

**PERANAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN HARGA BARANG POKOK
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**¹Novi Nainggolan,²Ujang Suhermanmn22.novinainggolan@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

This internship aimed to study the implementation of information systems for monitoring staple food prices as a means of controlling inflation at the Department of Industry and Trade of Karawang Regency. The methods included direct observation of the price data collection process, data input into SP2KP, SI LINDA, and the Karawang Market Price Information Application, and analysis of field challenges. The results show that these systems play a vital role in delivering fast, accurate, and integrated price data to support policy-making on price control and economic stability. The intern also identified issues such as reporting delays, system errors, and input restrictions that affect data accuracy. The conclusion is that while the systems are functioning adequately, improvements in infrastructure, coordination, and system flexibility are still needed. The implication is that digital system development and regular staff training should be prioritized to enhance future price monitoring effectiveness.

Keywords: *nformation System, Inflation Control, SP2KP, SI LINDA, Market Price Data, Staple Goods*

Abstrak

Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mempelajari peranan sistem informasi pemantauan harga barang pokok sebagai upaya pengendalian inflasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap proses pendataan harga, partisipasi dalam input data ke aplikasi SP2KP, SI LINDA, dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang, serta analisis terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem informasi tersebut berperan penting dalam menyajikan data harga secara cepat, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian harga dan stabilitas ekonomi. Praktikan juga menemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pengiriman data dari pasar, gangguan teknis sistem, serta pembatasan input harga yang berdampak pada akurasi laporan. Kesimpulan dari kerja praktik ini adalah bahwa sistem informasi yang diterapkan sudah berjalan cukup baik, namun perlu penguatan dari sisi infrastruktur, koordinasi, dan fleksibilitas sistem. Implikasinya, pengembangan sistem digital dan pelatihan petugas secara berkala perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan harga di masa mendatang.

Kata kunci: *Sistem informasi, Pengendalian inflasi, SP2KP, SI LINDA, Data harga pasar, Barang kebutuhan pokok*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN**

Pada era teknologi digital ini, sangatlah dibutuhkan berbagai bentuk informasi yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan secara cepat. Informasi yang dibutuhkan haruslah akurat dan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih bagi pengguna informasi tersebut. Kebutuhan informasi saat ini menjadi prioritas utama bagi para *decision maker* (pengambil keputusan) dalam mengelola Perusahaan (Adnyana & Dewi, 2022:779).

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, penerapan sistem digital dalam berbagai aspek kehidupan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam monitoring harga barang

pokok. Salah satu tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah dengan menyediakan data harga yang akurat, cepat, dan real-time. Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemantauan harga barang pokok secara efektif melalui sistem digital menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan perdagangan, khususnya dalam pemantauan harga barang pokok. Untuk mendukung fungsi ini, menggunakan berbagai aplikasi digital seperti SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang dalam pencatatan dan pemantauan harga. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan seperti keterlambatan penginputan data, kesulitan dalam validasi harga yang akurat, serta kurangnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam analisis harga. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem pencatatan harga agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam kebijakan pengendalian inflasi.

Kerja praktik bertujuan memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dunia kerja, sekaligus mengasah keterampilan teknis dan non-teknis serta membangun relasi profesional. Secara khusus, praktik ini bertujuan untuk memahami peran sistem informasi dalam pemantauan harga barang pokok, proses kerja pengendalian perdagangan melalui aplikasi SP2KP, SI LINDA, dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang, serta menganalisis dinamika harga dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar.

Tinjauan Pustaka Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam organisasi yang mencakup aktivitas memperoleh, mengelola, dan menggunakan dana secara efektif dan efisien. Menurut (Dr. Samsurijal Hasan, S.P et al., 2022:1), manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada perolehan dana, tetapi juga pada cara penggunaan dan pengelolaannya. Kasmir (2015) dalam (Jaya et al., 2023:1) menyebutkan bahwa kegiatan utama dalam manajemen keuangan meliputi memperoleh dana, mengelolanya seefisien mungkin, serta mengatur aset perusahaan secara optimal. Sementara itu, Irfani (2020) dalam (Jaya et al., 2023:1) juga mendefinisikan manajemen keuangan sebagai upaya mengelola keuangan perusahaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Dengan penerapan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas usaha, meningkatkan kinerja keuangan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan terintegrasi antara manusia dan mesin yang berfungsi untuk mengelola serta menyajikan informasi guna mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut AR Farizky (2016) dalam (Adnyana & Dewi, 2022:1), sistem informasi memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur manual, model manajemen, dan basis data, serta melibatkan interaksi antara manusia sebagai pengelola dan mesin sebagai alat pemroses informasi. Senada dengan itu, Sutiyadi (2017) dalam (Adnyana & Dewi, 2022:1) juga menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu manusia dan mesin yang dirancang untuk mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem informasi bertujuan mempermudah dan mempercepat pengolahan informasi secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Inflasi

Inflasi adalah metrik yang digunakan oleh para ekonom untuk menunjukkan tren umum kenaikan harga di seluruh perekonomian suatu negara. Kenaikan harga secara keseluruhan atau penurunan daya beli uang tunai yang beredar adalah gejala inflasi (Lestari et al., 2023:3). Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. (Lestari et al., 2023:3) menyebutkan bahwa inflasi mencerminkan gejala penurunan nilai uang dalam perekonomian. Suseno dan Astiyah (2009) yang dikutip dalam (Hidayat, 2023:2) menjelaskan bahwa inflasi hanya terjadi jika kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus, bukan karena faktor musiman. Menurut Astiyah dalam (Triwahyuni, 2021:44), inflasi dipicu oleh peningkatan konsumsi, kelebihan likuiditas, serta gangguan distribusi barang. Hidayat (2023) mengelompokkan inflasi menjadi empat jenis berdasarkan tingkat keparahannya: ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab penting pemerintah karena inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk distribusi pendapatan, menurunkan tabungan domestik, serta menyebabkan defisit neraca perdagangan dan peningkatan utang luar negeri. (Triwahyuni, 2021:43) menekankan bahwa kebijakan fiskal yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan perekonomian makro, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan demikian, pengendalian inflasi yang efektif sangat krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah metode deskriptif implementatif, yaitu dengan cara menggambarkan secara langsung kegiatan yang dilakukan di lapangan serta bagaimana implementasi sistem atau kegiatan yang ada di instansi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai, serta dokumentasi dari aktivitas harian selama masa kerja praktik.

Kerja praktik dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 2 Januari 2025 hingga 27 Maret 2025. Kegiatan dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No.30, Tanjungpura, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41315.

Target kegiatan kerja praktik ini adalah memahami peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengendalikan harga barang pokok dan inflasi, serta mengetahui proses pengumpulan dan pelaporan data harga harian. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah Bidang Perdagangan Dalam Negeri (Indag) yang bertanggung jawab dalam pemantauan harga komoditas pokok melalui aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang.

Subjek dari kegiatan kerja praktik ini adalah pegawai di bidang Pengendalian Perdagangan, khususnya yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data harga barang pokok. Selain itu, data yang diperoleh dari SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang, menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Prosedur kerja praktik diawali dengan melakukan pengenalan lingkungan kerja dan pembagian tugas oleh pembimbing lapangan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan observasi terhadap kegiatan pengumpulan data harga komoditas pokok harian di pasar-pasar yang telah ditentukan. Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang. Mahasiswa juga turut membantu dalam pembuatan laporan serta pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan Spreadsheet, serta terlibat dalam proses analisis sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, praktikan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami bahwa pelaporan data harga barang kebutuhan pokok ke dalam sistem SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang merupakan bagian penting dari pengendalian perdagangan daerah. Integrasi sistem ini mendukung penyajian data yang akurat dan real-time, serta membantu pengawasan distribusi, pengendalian harga, dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

2. Mengetahui dan memahami pentingnya pengolahan dan analisis data harga, praktikan mampu meningkatkan keterampilan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Spreadsheet. Melalui kerja praktik, praktikan belajar menghitung perubahan harga secara akurat dan menyajikan data secara sistematis, sehingga mendukung pengawasan dan pengendalian harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengendalian inflasi daerah, **dari kegiatan** rapat koordinasi lintas sektor, praktikkan memahami strategi distribusi barang, stabilisasi harga, serta peran masing-masing instansi.

Pembahasan

Selama pelaksanaan kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, praktikan mendalami penggunaan tiga sistem informasi utama, yaitu SP2KP, SI LINDA, dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang. Ketiganya memiliki peran strategis dalam memantau dan melaporkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang menjadi salah satu indikator utama dalam pengendalian inflasi. SP2KP milik Kementerian Perdagangan berfungsi sebagai pusat pelaporan harga secara nasional, sementara SI LINDA sebagai sistem milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih berfokus pada pengendalian inflasi daerah. Sedangkan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang dimiliki oleh pemerintah daerah Karawang dan menjadi media penyampaian harga di tingkat kabupaten. Ketiga sistem ini saling melengkapi dan memperkuat upaya pemerintah dalam mendeteksi, mengontrol, dan mengintervensi kondisi harga pasar yang fluktuatif.

Sistem informasi pemantauan harga barang pokok mulai digunakan pada tahun 2021. Dalam praktiknya, alur pencatatan harga dimulai dari survei lapangan oleh petugas lapangan, pencatatan ke kertas kerja, penginputan ke aplikasi paling lambat pukul 11.00 WIB dan membuat laporan harian. Tugas ini memberikan wawasan tentang pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data. Data yang masuk ke dalam sistem menjadi bahan analisis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diolah menjadi angka inflasi nasional, provinsi, hingga daerah. Pemerintah pusat menggunakan data ini untuk menentukan kebijakan seperti subsidi, operasi pasar, dan intervensi harga.

Dalam upaya pengendalian inflasi yang lebih terkoordinasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara *virtual* bersama seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Rapat ini bertujuan untuk memantau kondisi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, serta menyusun langkah-langkah cepat dan terpadu guna menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Di tingkat nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara *virtual* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pusat seperti BPS, BULOG, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, perwakilan

TNI, Kementerian Pertanian (Kemtan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rapat ini turut mengundang seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai bentuk sinergi lintas sektor dan wilayah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif dan responsif terhadap dinamika pasar.

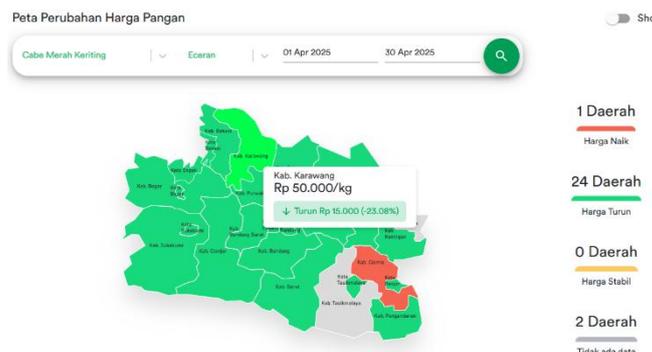
Dalam mendukung pengambilan keputusan pada saat rapat koordinasi, tampilan data dalam Sistem SI LINDA memiliki peran yang sangat penting. Berbagai bentuk tampilan visual yang tersedia membantu pemerintah untuk memahami perkembangan harga, tidak hanya dari angka-angka saja, tetapi juga dari lokasi wilayah dan tingkat perubahan harganya.



Gambar 1. Fluktuasi Harga Cabe Merah Keriting di Karawang pada Bulan April

Sumber : <https://silinda.jabarprov.go.id/> , (2025)

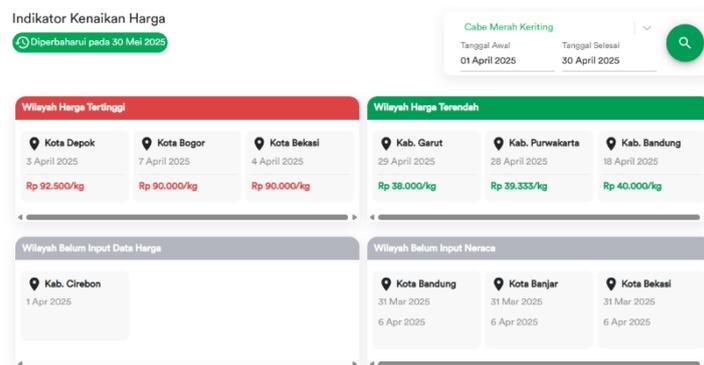
Sebagai contoh Pada Gambar 2 menampilkan fluktuasi harga salah satu komoditas yaitu cabe merah keriting di Kabupaten Karawang selama bulan April. Pada gambar tersebut menunjukkan adanya tren penurunan harga cabe merah keriting setelah sempat naik di pertengahan April, grafik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan harga dari minggu ke minggu, sehingga memudahkan pihak dinas dalam melihat tren kenaikan atau penurunan harga. Dengan adanya grafik ini, pemerintah daerah dapat menentukan apakah diperlukan intervensi pasar atau hanya pemantauan lanjutan. Grafik ini juga bermanfaat sebagai alat prediksi awal untuk mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi menyebabkan inflasi.



Gambar 2. Peta Perubahan Harga Cabe Merah Keriting Pada Bulan April

Sumber : <https://silinda.jabarprov.go.id/> , (2025)

Selanjutnya, Gambar 3 menunjukkan peta perubahan harga cabe merah keriting di berbagai wilayah Jawa Barat pada bulan April. Peta ini memiliki fungsi penting sebagai representasi spasial yang menggambarkan wilayah-wilayah yang mengalami perubahan harga signifikan. Dengan visualisasi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah mana saja yang terdampak paling besar, serta menentukan alokasi sumber daya dan distribusi logistik yang lebih tepat sasaran, seperti pelaksanaan operasi pasar di wilayah jika terjadi lonjakan harga tertinggi.



Gambar 3. Indikator Kenaikan Cabe Merah Keriting Pada Bulan April

Sumber : <https://silinda.jabarprov.go.id/> , (2025)

Sementara itu, Gambar 4 menyajikan indikator kenaikan harga cabe merah keriting, yang disusun dalam bentuk klasifikasi warna atau level tertentu. Indikator ini berfungsi sebagai peringatan dini (*early warning system*) yang menunjukkan tingkat urgensi dari gejolak harga. Melalui indikator ini, pemangku kebijakan dapat secara cepat memahami situasi pasar tanpa harus menelusuri data mentah secara rinci. Hal ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan yang cepat dan responsif, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat distribusi barang terganggu.

Visualisasi fluktuasi harga pangan, peta perubahan harga pangan dan indikator kenaikan harga, seperti yang ditampilkan dalam Sistem SI LINDA, memberikan nilai tambah yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Melalui tampilan tersebut, pemerintah dapat memantau secara geografis wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan harga signifikan dan segera merumuskan tindakan yang diperlukan.

Dengan dukungan visual ini, data tidak hanya menjadi angka, tetapi menjadi informasi strategis yang mudah dianalisis secara cepat dan tepat. Hal ini juga mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memperkuat transparansi kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tingkat lokal maupun regional.

Permasalahan

Selama melaksanakan kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, praktikan menghadapi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan proses pemantauan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas sistem informasi dalam mendukung pengendalian inflasi serta kelancaran pelaporan kepada instansi terkait. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Keterlambatan Petugas Lapangan dalam Melaporkan Data Harga Harian

Selama pelaksanaan kerja praktik, praktikan mendapati bahwa data harga dari petugas lapangan sering kali datang terlambat. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti waktu pengambilan data yang tidak konsisten, kendala komunikasi, serta keterbatasan waktu operasional di lapangan atau bahkan keterlambatan dalam proses pengiriman data ke kantor pusat. Dampaknya, proses input data ke dalam sistem menjadi terhambat dan laporan harga harian tidak dapat disusun atau dikirim tepat waktu.

2. Kendala Teknis pada Sistem yang Digunakan

Sistem seperti SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang memiliki batas waktu pengiriman data hingga pukul 11.00 WIB. Namun, dalam beberapa kesempatan, sistem mengalami kendala teknis seperti *error* pada *server*, lambatnya proses input, hingga kegagalan penyimpanan data. Permasalahan ini menyebabkan data yang terlambat tidak dapat diunggah dan akhirnya terlewat dari pelaporan harian. Keterbatasan teknis ini berdampak langsung pada ketepatan waktu dan kelengkapan data harga yang menjadi dasar perhitungan inflasi daerah.

3. Pembatasan Harga dalam Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang

Salah satu sistem yang digunakan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang. Aplikasi ini memiliki fitur pembatas harga maksimum pada beberapa jenis barang pokok. Meskipun fitur ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah spekulasi berlebihan, dalam praktiknya justru menjadi kendala. Ketika harga aktual di pasar melebihi batasan harga yang sudah ditentukan dalam aplikasi, petugas tidak dapat memasukkan harga yang sesungguhnya. Akibatnya, data yang tercantum di sistem menjadi tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

4. Ketidaklengkapan Data dari Unit Pasar Lain

Dalam pelaporan harga barang pokok, data yang dikumpulkan berasal dari berbagai unit pasar di Kabupaten Karawang. Namun, terdapat unit pasar yang tidak mengirimkan data secara rutin, bahkan ada yang sama sekali tidak menyampaikan data. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan laporan data

harga secara keseluruhan menjadi tidak lengkap dan mengurangi keakuratan informasi yang digunakan untuk analisis inflasi atau evaluasi distribusi barang kebutuhan pokok secara regional. Hal ini juga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data yang menyeluruh.

Solusi Kendala Pelaksanaan Kerja Praktik

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa solusi sementara selama kerja praktik, antara lain:

1. Koordinasi lebih intensif dengan petugas lapangan, melakukan komunikasi langsung secara rutin kepada petugas pasar untuk memastikan data dikirim tepat waktu, serta memberikan pengingat menjelang batas waktu pengiriman.
2. Optimalisasi sistem dan infrastruktur teknologi informasi perlu menjadi prioritas. Pihak pengelola aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang sebaiknya meningkatkan kapasitas *server*, mengurangi waktu muat sistem (*loading time*), serta menyediakan fitur *auto-save* dan notifikasi *error* yang jelas agar pengguna lebih mudah mendeteksi dan menangani gangguan teknis secara cepat.
3. Melakukan evaluasi terhadap pengaturan batas harga maksimum dalam sistem, serta mengusulkan penyesuaian pada aplikasi agar dapat mencatat harga riil yang terjadi di lapangan. Upaya ini bertujuan untuk menghindari perbedaan data antar sistem, meningkatkan akurasi informasi, dan memastikan kesesuaian antara harga yang tercatat dengan kondisi pasar sebenarnya.
4. Menindaklanjuti unit pasar yang tidak mengirimkan data harga harian, dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah tersebut guna mengetahui alasan di balik ketidakteraturan pengiriman data. Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat agar pelaporan dapat dilakukan secara konsisten ke depannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang memberikan pengalaman berharga bagi praktikan dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik nyata. Praktikan memahami pentingnya sistem informasi seperti SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang dalam mendukung pengumpulan dan pelaporan data harga secara real-time, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Praktikan juga terlibat langsung dalam proses survei pasar, pencatatan harga, dan penginputan data, serta mengembangkan keterampilan pengolahan data menggunakan Excel dan Spreadsheet.

Selain itu, praktikan memperoleh pemahaman mengenai dinamika harga kebutuhan pokok, mulai dari fluktuasi harga, distribusi barang, hingga pengaruh kebijakan pemerintah. Keterlibatan dalam rapat pengendalian inflasi memberikan wawasan tambahan mengenai peran strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di masyarakat. Namun, selama pelaksanaan kerja praktik, ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pengiriman data dari pasar, kendala teknis pada sistem, serta keterbatasan fitur aplikasi. Permasalahan ini berdampak pada akurasi dan kelengkapan data harga, sehingga diperlukan perbaikan sistem dan peningkatan koordinasi antar pihak terkait untuk mendukung efektivitas pengendalian perdagangan.

Saran

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan acuan bagi peserta kerja praktik berikutnya agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan bermanfaat:

1. Peserta kerja praktik diharapkan memiliki pemahaman awal mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam proses pemantauan harga, seperti SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat), dan Aplikasi Informasi Harga Pasar Kabupaten Karawang, agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan tugas yang diberikan.
2. Disarankan agar peserta proaktif bertanya dan berdiskusi dengan pegawai di lingkungan kerja agar mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang proses pengumpulan dan pelaporan data harga barang pokok.
3. Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan Spreadsheet, karena kedua perangkat ini sangat sering digunakan dalam kegiatan harian.
4. Bagi pihak instansi, disarankan untuk memberikan pelatihan mengenai sistem kerja dan alur pengolahan data, agar mahasiswa dapat langsung memahami peran dan tugas yang akan dilakukan selama masa kerja praktik.
5. Berdasarkan saran dari pembimbing lapangan, peserta kerja praktik juga diharapkan mampu menyampaikan ide atau masukan sederhana yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi atau alur kerja yang ada, sebagai bentuk kontribusi positif selama pelaksanaan kerja praktik.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan kegiatan kerja praktik berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi mahasiswa maupun pihak instansi tempat pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. K. W., & Dewi, N. A. N. (2022). Pkm Monitoring Harga Pokok Persediaan Dengan Metode Fifo Berbasis Aplikasi Website. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2), 779. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i2.8689>
- Dr. Samsurijal Hasan, S.P, M. M., Dr. Elpisah, S.E., M. P., Dr. Joko Sabtohad, S. E. M. M., Nurwahidah M, S.E., M. S., Dr. Abdullah, S.E., M. M., & Dr. H. Fachrurazi, S. A. M. M. (2022). Manajemen Keuangan. In *Jurnal Keuangan dan Perbankan* (Vol. 16, Issue 1).
- Hidayat, A. (2023). Pengendalian Inflasi Akan Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(1), 152–157. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i1.1820>
- Jaya, A., Kuswandi, S., Prastyandari, C. W., Baidlowi, I., Mardiana, Ardana, Y., Sunandes, A., Nurlina, Palnus, & Muchsidin, M. (2023). Manajemen Keuangan. In *Modul Kuliah* (Vol. 7, Issue 2).
- Lestari, D. P., Prakoso, S. B., Lingga Virgita, V., & Suherman, U. (2023). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmia Akuntansi*. 15(2), 1–7. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>